

PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI 6 PROVINSI PULAU JAWA



SKRIPSI

**Diajukan untuk
memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

Adira Frizkylanov

2015110040

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKONOMI PEMBANGUNAN
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018**

BANDUNG

2021

**THE IMPACT OF INFRASTRUCTURE ON ECONOMIC
GROWTH AND INCOME INEQUALITY ON SIX
PROVINCES OF JAVA ISLAND**



UNDERGRADUATE THESIS

**Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor Degree in Economics**

By

Adira Frizkylanov

2015110040

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS
Accredited by National Accreditation Agency No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018**

**BANDUNG
2021**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN



PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN
PENDAPATAN DI 6 PROVINSI PULAU JAWA**

Oleh:

Adira Frizkylanov

2015110040

Bandung, Januari 2021

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan,



Ivantia S. Mokoginta, Ph.D

Pembimbing,



Siwi Nugraheni, Dra., M.Env

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Adira Frizkilianov
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 20 Nobember 1996
NPM : 2015110040
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan
Jenis naskah : Skripsi

JUDUL

Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan pendapatan di 6 provinsi Pulau Jawa

Pembimbing : Siwi Nugraheni, Dra., M.Env.

MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidal terbatas pada buku, makalah, surat kabar, inernet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau

Bandung, 04 Februari 2021

Dinyatakan tanggal : 04 Februari 2021

Pembuat pernyataan :



(Adira Frizkilianov)

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan, ada kemungkinan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam jangka pendek ketimpangan pendapatan di daerah tidak akan berdampak, akan tetapi dalam jangka panjang ketimpangan pendapatan akan berdampak ke tingkat nasional. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat menyebabkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan antara lain dengan cara pembangunan infrastruktur dan peningkatan akumulasi modal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan berapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan enam provinsi di Pulau Jawa. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi OLS. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan infrastruktur regulasi, sosial, transportasi, dan realisasi modal dalam negeri (RMDN) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, infrastruktur regulasi, sosial, transportasi dan PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Infrastruktur transportasi memperburuk PDRB per kapita dan ketimpangan pendapatan.

Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, infrastruktur, akumulasi modal.

ABSTRACT

Economic development that focuses on growth, have a possibility to increase income inequality. In the short run income inequality at regional level will have no impact, however in the long run income inequality will have an impact at the national level. Income inequality leads to social, economic, and environmental problems. The government of Indonesia has made various policies to achieve sustainable economic growth by developing infrastructure, and increasing capital. This study aims to find the impact of infrastructure on economic growth and income inequality in six provinces of Java Island. This study used OLS regression as the analytical method. The findings in this study indicate that regulation infrastructure, social infrastructure, transportation infrastructure, and domestic investment realization (RMDN) significantly affect per capita of Gross Domestic Regional Product (GDRP). Regulation infrastructure, social infrastructure, transportation infrastructure, and per capita GDRP significantly affect income inequality. Transportation infrastructure worsens per capita GDRP and income inequality.

Key words: Economic growth, income inequality, infrastructure, capital accumulation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul “Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di 6 Provinsi Pulau Jawa”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki penelitian ini dimasa yang akan datang.

Selama pembuatan skripsi ini, penulis mendapat berbagai bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yang menjadi orang paling berharga bagi penulis dan nenek penulis tersayang. Terima kasih atas doa, nasihat, kasih sayang, serta dukungan materi dan non-materi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Siwi Nugraheni, Dra., M.Env. Selaku dosen pembimbing dan dosen kajian Ekonomi Kawasan dan Lingkungan yang selalu membantu penulis dengan sabar, dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan pendapat, berdiskusi, memberi nasihat, kritk, saran dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Miryam B. L. Wijaya selaku ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan dan dosen wali penulis, terimakasih atas segala ilmu, didikan dan telah mengajarkan cara berpikir yang lebih kreatif dan disiplin.
4. Ibu Iva S. Mokoginta Ph.D. selaku kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan, terima kasih atas ilmu dan didikan yang telah ibu berikan.
5. Ibu Hilda Maniaritta Pohan, Ph. D., Pak M. Ishak S., MSP., Pak Martinus Yuwana, selaku dosen Kajian Ekonomi Kawasan dan Lingkungan. Terima kasih atas ilmu serta pengalaman yang telah dibagikan kepada saya selama perkuliahan.
6. Ibu Noknik K. H., dan Ibu Januarita Ph.D. Selaku dosen Ekonomi Pembangunan UNPAR. Terima kasih atas segala ilmu, tenaga, waktu, serta nasihat telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh dosen Ekonomi Pembangunan UNPAR, terima kasih atas ilmunya, didikan, dan waktu yang selalu diberikan selama masa perkuliahan.

8. Dani, Yudha, Abram, Farel, Adam, Raisa, Sisi, Nico, Hana, Sarah, Lizy, Mathew, Tama, Billy, Audi, Monic, Andrian, Inal. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, bantuan dan kerjasamanya. Mereka menjadi sahabat penulis selama perkuliahan penulis.
9. Seluruh keluarga EP 2015 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas seluruh kenangan dan pengalaman selama perkuliahan.
10. Keluarga besar SMA negeri 2 Bandung. Terima kasih atas seluruh dukungan, ilmu, pengalaman, dan kenangan yang sudah memotivasi penulis untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
11. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu karena telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga penelitian selanjutnya.

Bandung, 4 Februari 2021

Adira Frizkılanov

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Pemikiran.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	8
2.2. Ketimpangan Pendapatan.....	10
2.3. Kurva Kuznets Berbentuk “U-terbalik”.....	12
2.4. <i>Middle Income Trap</i>	14
2.5. Penelitian Sebelumnya.....	15
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	18
3.1. Metode Penelitian.....	18
3.1.1. Model Persamaan Regresi.....	18
3.1.2. Perhitungan Indeks Infrastruktur dengan <i>Principal Component Analysis</i>	20

3.2. Objek Penelitian.....	22
3.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.....	23
3.2.2. Koefisien Gini.....	24
3.2.3. Indeks Infrastruktur Regulasi (IPIR).....	25
3.2.4. Indeks Infrastruktur Transportasi (IPIT)	26
3.2.5. Indeks Infrastruktur Sosial (IPIS)	27
3.2.6. Realisasi Modal Dalam Negeri (RMDN).....	28
3.2.7. Realisasi Modal Luar Negeri (RMLN).....	29
3.2.8. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Dewasa (RL).....	30
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Hasil Pengolahan Data	31
4.1.1. Uji Multikolinearitas.....	33
4.1.2. Uji Heteroskedastisitas	34
4.1.3 Uji Chow	35
4.1.8 Uji Hausman	36
4.2 Pembahasan	37
4.2.1 Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi	37
4.2.2 Pengaruh Infrastruktur pada Ketimpangan Pendapatan.....	39
BAB 5 PENUTUP.....	43
5.1. Simpulan	43
5.2. Rekomendasi	44
DAFTAR PUSTAKA	46

LAMPIRAN 1: PCA	A-1
PCA IPIT	A-1
PCA IPIS	A-1
PCA IPIR	A-2
LAMPIRAN 2: UJI CHOW.....	A-3
Persamaan 1	A-3
Persamaan 2	A-4
LAMPIRAN 3: UJI HAUSMAN	A-4
Persamaan 1	A-4
Persamaan 2	A-5
LAMPIRAN 4: UJI ASUMSI KLASIK.....	A-6
Uji Multikolinearitas persamaan 1	A-6
Uji Multikolinearitas persamaan 2	A-6
Uji Heteroskedastisitas persamaan 1	A-7
Uji Hetero Persamaan 2	A-7
LAMPIRAN 5: HASIL REGRESI setelah <i>REMEDIAL MEASURE</i>	A-8
Persamaan 1	A-8
Persamaan 2	A-8
RIWAYAT HIDUP.....	B-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	7
Gambar 2. Kurva Lorenz	11
Gambar 3. Kurva “U-Terbalik” Kuznets.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rasio Gini Provinsi-provinsi di Pulau Jawa 2012-2018.....	2
Tabel 2: Patokan Nilai Koefisien Gini.....	12
Tabel 3. Hasil Perhitungan PCA untuk Indeks Infrastruktur Regulasi (IPIR).....	21
Tabel 4. Hasil Perhitungan PCA untuk Indeks Infrastruktur Sosial (IPIS).....	22
Tabel 5. Hasil Perhitungan PCA untuk Indeks Infrastruktur Regulasi (IPIR).....	22
Tabel 6. Data dan Sumber Data.....	23
Tabel 7. Koefisien Korelasi Antar Variabel Bebas – Persamaan 1	33
Tabel 8. Koefisien Korelasi Antar Variabel Bebas – Persamaan 2	34
Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas – Persamaan 1.....	35
Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas – Persamaan 2.....	35
Tabel 11. Hasil Uji Chow	36
Tabel 12. Hasil Uji Hausman	36
Tabel 13. Hasil Estimasi Regresi Persamaan Pertama (Fixed Effect Model).....	37
Tabel 14. Hasil Estimasi Regresi Persamaan Kedua (Random Effect Model)	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. PDRB per kapita Provinsi di Pulau Jawa, 2012 – 2018 (juta Rupiah)	24
Grafik 2. Koefisien Gini Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2012 - 2018	25
Grafik 3. Indeks Infrastruktur Regulasi Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2012 – 2018	26
Grafik 4. Indeks Infrastruktur Transportasi Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2012 – 2018.....	27
Grafik 5. Indeks Infrastruktur Sosial Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2012 – 2018....	28
Grafik 6. Realisasi Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2012 – 2018	29
Grafik 7. Realisasi Modal Luar Negeri Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2012 – 2018.....	30

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tercatat adanya peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Menurut Bank Indonesia (2017) pertumbuhan ekonomi di Indonesia tumbuh sebesar 5,3%. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penentu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 yaitu, investasi dan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2017 tercatat belanja pemerintah, dan investasi pada infrastruktur meningkat sebesar 44,3% (Bank Indonesia, 2017). Peningkatan faktor tersebut diduga menjadi faktor pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum menjamin terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi yang memfokuskan pada pertumbuhan, walaupun tidak selalu, tetapi ada kemungkinan meningkatkan ketimpangan pendapatan (Lundberg & Squire, 2003). Hal ini berarti, adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diiringi dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wijayanto (2016) dimana, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, ketimpangan pendapatan menurun. Menurut Amri (2017) pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, akan tetapi ketimpangan pendapatan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki korelasi terhadap ketimpangan pendapatan, akan tetapi ketimpangan pendapatan memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya ketika ketimpangan pendapatan meningkat, pertumbuhan ekonomi akan menurun.

Berdasarkan data rasio gini di pulau Jawa dari tahun 2017-2018 pada tabel 1, ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa memiliki perbedaan, ada yang meningkat setiap tahunnya, dan ada yang menurun. Berdasarkan Tabel 1, tingkat rasio gini tertinggi terjadi pada provinsi D.I Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan tingkat rasio gini secara nasional pada tahun 2017 dimana tingkat gini rasio di D.I Yogyakarta sebesar 0,44, dan tingkat rasio gini nasional sebesar 0,389. Provinsi D.I Yogyakarta memiliki tingkat rasio gini yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan gini rasio di tingkat nasional. Hal ini artinya, walaupun distribusi pendapatan secara nasional

sudah mulai merata, akan tetapi di provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih belum merata dengan baik.

Tabel 1. Rasio Gini Provinsi-provinsi di Pulau Jawa 2017-2018

Provinsi	2017	2018
DKI Jakarta	0,409	0,39
Jawa Barat	0,393	0,405
Jawa Tengah	0,365	0,357
DI Yogyakarta	0,44	0,422
Jawa Timur	0,415	0,371
Banten	0,379	0,367

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2018)

Tingkat rasio gini yang tinggi, dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan di daerah. Dalam jangka pendek tidak akan berdampak, akan tetapi dalam jangka panjang akan berdampak ke tingkat nasional. Hal ini dikarenakan, dengan adanya jarak antara kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah membuat ketimpangan semakin melebar, sehingga dapat meningkatkan kemiskinan. Ketimpangan pendapatan dapat menjadi masalah serius, karena dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Ketimpangan pendapatan di tingkat nasional dapat menyebabkan pemerintah mengambil keputusan yang tidak tepat untuk situasi permasalahan ekonomi di tingkat daerah (Makmuri, 2017). Meningkatnya kemiskinan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang menurun. Dengan kata lain, kemiskinan berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan, dan hal ini akan berdampak pada ekonomi secara makro (Wijayanto, 2016).

Selain itu, daerah yang memiliki tingkat rasio gini yang tinggi, mengalami kemungkinan terperangkap dalam *middle income trap*, dimana dengan kondisi daerah yang terperangkap dalam *middle income trap* dapat berdampak secara nasional, sehingga pertumbuhan negara akan terperangkap dalam pertumbuhan ekonomi yang stagnan, bahkan dapat mengurangi pertumbuhan ekonominya (Farole, 2013). Negara yang terjebak dalam *middle income trap* mempunyai ketidakmampuan untuk berkompetisi dengan *negara low income* dalam hal upah buruh, dan ketidakmampuan untuk berkompetisi dengan *negara high income* dalam hal keahlian dan kemajuan inovasi (Agenor & Canuto, 2015).

Faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan menurut (Kementerian keuangan, 2015).

1. Ketimpangan peluang, keluarga yang miskin akan sulit mengakses pendidikan.
2. Ketimpangan pasar tenaga kerja, pekerja berketerampilan tinggi akan mendapatkan gaji yang lebih besar, dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang rendah akan mendapatkan gaji rendah.
3. Konsentrasi kekayaan yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang.
4. Ketimpangan menghadapi guncangan, masyarakat yang berpendapatan rendah akan mudah terdampak adanya guncangan. Dengan adanya guncangan membuat kelompok masyarakat berpendapatan rendah menyebabkan menurunnya kemampuan memperoleh pemasukan, dan investasi kesehatan, serta pendidikan

Setiap provinsi di Pulau Jawa memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda, salah satunya disebabkan oleh adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya ketimpangan pendapatan yang berbeda di setiap provinsi di Pulau Jawa. Sehingga, perlu peranan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan meningkatkan akumulasi modal, dan melakukan pembangunan infrastruktur. Menurut Harrod & Domar dalam Todaro & Smith (2011) pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan tingkat tabungan dan akumulasi modal. Hubungan akumulasi modal dan investasi sangat erat (Todaro & Smith, 2011). Artinya dengan

menambahkan akumulasi modal maka, investasi yang diperlukan semakin besar juga. Investasi didapat melalui dua cara yaitu dengan penanaman modal asing (PMA), dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Menurut Humba-tova et al (2020) Investasi memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan investasi akan diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Humba-tova, Tanriverdiev, & Mammadov, 2020).

Pembangunan infrastruktur juga dipilih oleh pemerintah sebagai upaya untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Menurut Makmuri (2017) pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan perekonomian, serta dapat menurunkan ketimpangan pendapatan antar provinsi-provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh penting terhadap pembangunan ekonomi, serta mengatasi masalah ketimpangan pendapatan. Hal tersebut dibuktikan oleh Sukwika (2017), Misra (2019), dan Mendoza (2017) dimana pembangunan infrastruktur transportasi, infrastruktur sosial, dan infrastruktur regulasi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Selain meningkatkan perekonomian, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Menurut Brennan & Kerf (2002) dengan adanya pembangunan infrastruktur transportasi, dan infrastruktur sosial, dapat mempermudah akses masyarakat untuk menikmati fasilitas infrastruktur yang tersedia. Dengan kata lain, semakin banyak infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, dapat meningkatkan modal manusia, dan produktivitas.

Selain pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan akumulasi modal, pemerintah juga mendorong kualitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan produktivitas. hal ini sesuai dengan penelitian Schultz (1982) dalam Nadya & Syafri (2019) bahwa ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dengan dengan adanya peningkatan pada modal manusia. Dalam hal ini, pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan modal manusia. Aluhwalia (1976) dalam Nadya & Syafri (2019) berpendapat bahwa, dengan adanya peningkatan pendidikan dapat membuat tenaga kerja untuk lebih terampil, dan meningkatkan pengetahuan dalam bekerja. Artinya, dengan meningkatnya pengetahuan, dan keterampilan membuat kesempatan bekerja semakin tinggi, serta dapat meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi. Sehingga, pertumbuhan ekonomi meningkat, serta ketimpangan pendapatan menurun (Nadya & Syafri, 2019).

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi nasional terus meningkat, akan tetapi ketimpangan pendapatan di daerah-daerah masih terjadi, terutama di Pulau Jawa. Ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa masih terjadi walaupun berada pada daerah pusat pertumbuhan. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan, karena negara akan terperangkap pada kondisi *middle income trap*. Menurut data BPS (2018) PDRB per kapita di Pulau Jawa cukup tinggi, akan tetapi persebarannya tidak merata. PDRB perkapita tertinggi di Pulau Jawa terdapat di Provinsi DKI Jakarta, dan terendah berada di Provinsi D.I Yogyakarta. Ketimpangan pendapatan tertinggi berada di provinsi D.I Yogyakarta sebesar 0,422, lebih tinggi dari tingkat ketimpangan pendapatan nasional pada tahun 2018 sebesar 0,384 (Badan Pusat Statistik, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan peningkatan, rata-rata tumbuh 5% per tahun. Meskipun demikian, masih ada provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang memiliki nilai rasio gini yang relatif tinggi antara provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Farole (2013) berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di daerah tidak akan berdampak pada tingkat nasional, akan tetapi indikator ini tidak menangkap pertumbuhan ekonomi yang lambat dan meningkatnya kemiskinan di tingkat daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang melambat juga dapat menyebabkan kemungkinan suatu daerah terperangkap dalam *middle income trap*. Walaupun pusat pertumbuhan berada di Pulau Jawa, akan tetapi ketimpangan pendapatan di Provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih terjadi. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur, meningkatkan akumulasi modal, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, seharusnya pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, akan tetapi khususnya di Pulau Jawa masih ada yang memiliki nilai rasio gini yang cukup tinggi, yang menandakan distribusi pendapatan masih rendah di setiap provinsinya. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab, bagaimana dan seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menemukan berapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur dihitung dengan menggunakan indeks komposit untuk variabel infrastruktur transportasi, infrastruktur regulasi, dan infrastruktur sosial. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. dimana upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur seperti infrastruktur transportasi, infrastruktur regulasi, dan infrastruktur sosial; serta, meningkatkan akumulasi modal, dan kualitas pendidikan. Pembangunan infrastruktur, akumulasi modal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan diharapkan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di enam provinsi di Pulau Jawa.

Infrastruktur menjadi salah satu fasilitas yang memungkinkan terjadinya aktivitas ekonomi. Dengan adanya aktivitas ekonomi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Menurut Torrance (2009) infrastruktur dibagi menjadi tiga kategori yaitu: 1) Infrastruktur transportasi, merupakan sarana dan prasarana untuk untuk memindahkan orang, dan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya; 2) Infrastruktur regulasi, merupakan sarana dan prasarana yang dibuat oleh pemerintah, dimana dalam layanannya dikenakan regulasi dan kontrak. Setelah menggunakan layanan tersebut, masyarakat perlu membayar biaya layanannya; 3) Infrastruktur sosial, sarana dan prasarana yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Sukwika (2018), Makmuri (2017), Farole (2013), Mendoza (2017), dan Misra (2019) dalam hasil penelitian mereka, ada pengaruh positif pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, serta berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta dengan adanya pembangunan infrastruktur akan diiringi dengan menurunnya ketimpangan pendapatan.

Penambahan akumulasi modal dengan cara meningkatkan investasi dengan cara meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDA), dan penanaman modal asing (PMA) diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Menurut Harrod-Domar dalam Todaro & Smith (2011) dengan meningkatkan akumulasi modal maka, pertumbuhan akan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian Humba et al. (2020) dimana investasi memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya setiap ada peningkatan investasi, akan diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Selain penambahan akumulasi modal, dan pembangunan infrastruktur, peran pendidikan dalam meningkatkan modal manusia menjadi salah satu faktor penting dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Menurut Schultz (1982) dalam Nadya & Syafri (2019) bahwa ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dengan adanya peningkatan pada modal manusia. Dalam hal ini, pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan modal manusia. Menurut Aluhwalia (1976) dalam Nadya & Syafri (2019) dengan adanya peningkatan pendidikan dapat membuat tenaga kerja untuk lebih terampil, dan meningkatkan pengetahuan dalam bekerja. Artinya, dengan meningkatnya pengetahuan, dan keterampilan membuat kesempatan bekerja semakin tinggi, serta dapat meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi. Sehingga, pertumbuhan ekonomi meningkat, serta ketimpangan pendapatan menurun.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

